

**PENGARUH PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERHADAP KEADAAN
SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN 1974-1984**

Oleh: Triwahyuni
11407141013

Abstrak

Bidang pertanian merupakan bidang yang menjadi sasaran utama dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) era Orde Baru. Pertanian khususnya tanaman pangan padi mempunyai peranan penting dalam menyokong perekonomian negara. Pembangunan pertanian yang ditandai dengan dilaksanakannya modernisasi pertanian ini ditujukan kepada petani, agar bisa mencapai swasembada beras. Kabupaten Madiun dalam hal ini ikut berperan karena padi yang dihasilkan memperoleh surplus. Surplus beras ini kemudian dijual ke beberapa daerah yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan Kabupaten Madiun sebelum 1974, penerapan Pelita II dalam bidang pertanian dan pengaruh dari pembangunan pertanian masa Pelita II terhadap keadaan sosial ekonomi di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yang meliputi: *Pertama*, heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, verifikasi yaitu tahap pengkajian terhadap keaslian dan keakuratan sumber yang didapatkan. *Ketiga*, interpretasi yaitu tahap penggabungan antara satu fakta dengan fakta yang lain yang saling terkait. *Keempat*, historiografi yaitu tahap penulisan atau penyajian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1984 Kabupaten Madiun mengalami banyak perubahan setelah dilakukannya pembangunan pertanian. Mulai tahun 1974 yang merupakan tahun pertama dimulainya Pelita II, hingga tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Penerapan program Pelita dilakukan dengan cara merombak pembangunan negara, yaitu dari yang awalnya berlandaskan pada bidang industri diganti dengan bidang pertanian. Pembangunan pertanian ini memberikan dampak terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Madiun. Masuknya alat-alat pertanian modern telah menggeser peranan petani dalam bidang pertanian. Pergeseran ini awalnya terjadi pada bidang ekonomi, yang akhirnya berdampak pula pada bidang sosial, yaitu menimbulkan pengangguran dan tindak kejahatan.

Kata Kunci: Pertanian, Sosial Ekonomi, Kabupaten Madiun.

INFLUENCE OF AGRICULTURE ON SOCIO-ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN MADIUN REGENCY YEAR 1974-1984

By: Triwahyuni
11407141013

Abstract

Agriculture is the main target of the Pembangunan Lima Tahun (Pelita) New Order era. Agriculture, especially paddy have an important role in supporting the country's economy. Agricultural development which is characterized by the implementation of the modernization of agriculture is addressed to farmers, in order to achieve self-sufficiency in rice. Madiun Regency in this case played a role because the resulting gain rice surplus. The surplus is then sold to some regions that can not feed themselves. This research aims to look at how the circumstance of Madiun Regency before 1974, the application of Pelita II in agriculture and the effect of agricultural development in Pelita II to the socio-economic situation in the Madiun Regency.

This research used a critical history, which includes: Firstly, a heuristic which collecting relevant historical sources. Second, verification which assessment of the authenticity and kredibility of the source. Third, the interpretation which to combined between one fact with another fact interrelated. The last, historiography which writing or the presentation of the synthesis of history.

The results showed that in 1984, Madiun Regency occurs many changes, after agricultural development. Start from 1974, the first year of Pelita II, until the achievement of self-sufficiency in rice in 1984. The implementation of Pelita's program do with replace the development of the country, initially based on industry be replaced by the agriculture sector. Agricultural development is an impact on the socio-economic situation Madiun Regency. The entry of the tools of modern agriculture has shifted the role of farmers in agriculture. This shift was initially occurred in the economic sector, finally this shift impact to social sector, which result unemployment and crimes.

Keywords: Agriculture, Social Economy, Madiun Regency.

A. Pendahuluan

Pada saat Soeharto diangkat sebagai presiden Republik Indonesia, program pembangunan yang menjadi sasarannya adalah bidang ekonomi. Pada 15 Juni 1968 Soeharto membentuk sebuah tim yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengatur perkembangan perekonomian negara. Tim bentukan pemerintahan Soeharto ini kemudian diberi tugas untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi mengenai perekonomian negara, terutama memberikan arah pembangunan ekonomi. Hasil pemikiran dari tim ahli tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).¹ Perhatian besar terhadap pertanian mulai ditunjukkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu fokus pada pengembangan pertanian di Indonesia. Pertanian dijadikan acuan dalam pembangunan karena seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian.

Repelita adalah satuan perencanaan pembangunan perekonomian yang dibuat oleh rezim Orde Baru pemerintahan Soeharto saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Sedangkan Pembangunan Lima Tahun atau Pelita adalah program pelaksanaan dari Repelita. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan suatu rancangan yang di dalamnya memberikan suatu gambaran mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, beserta dengan perubahan struktur ekonomi negara selama kurun waktu lima tahun masa

¹ Zulkarnain, *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pujangga Press, 2012), hlm. 127.

pembangunan yang akan datang. Pelita dijalankan oleh Presiden Soeharto selepas terjadinya politisasi massa pada tahun 1965, yang secara langsung politisasi massa ini juga berimbas pada keadaan di Kabupaten Madiun yaitu terjadinya G30S. Tahun 1965 merupakan masa-masa tersulit dalam sejarah perjalanan Kabupaten Madiun.²

Pertanian masa Pemerintah Belanda ditandai dengan politik tanam paksa atau *Cultur Stelsel*. Tanah dan tenaga kerja menjadi sumber daya pokok dalam mengintensifikasi pertanian yang ditujukan untuk memproduksi tanaman-tanaman yang berkualitas jual ekspor. Tanaman yang berkualitas ekspor ini diantaranya seperti tebu, kopi, kina, teh, nila, tembakau, dan lain sebagainya. Sambil menanam tebu, penduduk juga menanam padi dan tanaman rumahan yang lainnya di sisa tanah desa.³

B. Keadaan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Madiun Sebelum Tahun 1974

Kabupaten Madiun merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang masuk ke dalam bagian Jawa Timur Tengah, tepatnya hampir di ujung barat Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Madiun termasuk wilayah administratif Propinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah Pembantu Gubernur di Madiun.

² Suko Widodo, *Menelusuri Jejak Masa Lalu: Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun*, (Surabaya: PUSKAKOM & Pemerintah Kabupaten Madiun, 2005), hlm. 104.

³ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa: Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 120.

Luas wilayah Kabupaten Madiun secara keseluruhan adalah 1010,86 km² atau 101,086 ha yang terletak antara 7° 12' - 7° 48' 38'' Lintang Selatan dan 111° 25' 45'' – 111° 51' Lintang Timur. Kabupaten Madiun secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi di sebelah Utara, Kabupaten Nganjuk dan Kediri di sebelah Timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah Selatan, serta Kabupaten Magetan di sebelah Barat.⁴

Pada awal dilaksanakannya program Pembangunan Jangka Panjang Pelita I 1969, pembangunan dalam bidang pendidikan telah banyak menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini berkaitan dengan pembangunan materiil yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan ini selain menerapkan program dari Pelita, juga menerapkan program-program non Pelita yang sarasannya meliputi pengembangan pelaksanaan ujian-ujian sekolah, pengembangan pemberantasan buta huruf, penataran tenaga pendidik, dan sistem pendidikan yang baru.⁵ Pemerintah Kabupaten Madiun selama Orde Lama dalam bidang kesehatan memberikan perhatian yang lebih terhadap tingkat kesehatan masyarakatnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menyiapkan Kader Kesehatan yang tugasnya memberikan penyuluhan atau pengetahuan tentang

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Kabupaten Madiun dalam Angka 1984*, (Madiun: Kantor Pusat Statistik, 1984), hlm. 1.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999), hlm. 170.

kesehatan dan keterampilan bagaimana menolong penderita. Pada tahun 1956 Pemerintah Kabupaten Madiun mulai merintis Pendidikan Kebidanan yang didukung oleh Rumah Sakit Umum Madiun.

Tingkat keagamaan masyarakat Kabupaten Madiun bisa dikatakan masih terikat adat tradisional. Mayoritas masyarakat Kabupaten Madiun masih mempercayai adanya kepercayaan Jawa atau *Kejawen*, artinya sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan Islam Kejawen atau yang disebut Islam Abangan. Adat istiadat masyarakat Kabupaten Madiun sebanyak 3% masih mengikat secara kental, sedangkan 96% terdapat pada tingkat transisi dan 1% nya sudah tidak lagi mengikat.⁶ Selain itu Pemerintah daerah juga membentuk Panitia Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri dari unsur-unsur jawatan pemerintah dan Lembaga Sosial Desa. Secara langsung, tim penanggulangan ini mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat bencana alam.

Dalam sektor tenaga kerja, penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar terdiri dari petani, buruh tani atau petani *gurem*, pengrajin, dan buruh kecil yang masih belum menerima pendapatan secara konsisten yang penghasilannya masih di bawah tingkat kebutuhannya yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 95% masyarakat Kabupaten Madiun hidup dari sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Hasil pertanian yang menjadi makanan pokok masyarakat

⁶ Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, *Potensi Desa Propinsi Jawa Timur: Type-Type Desa dan Tahap Perkembangannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1972), hlm. 125.

Kabupaten Madiun adalah beras, dengan menggunakan jagung dan ketela pohon sebagai makanan pokok kedua atau selingannya. Mereka menggunakan kedua makanan pokok ini dikarenakan faktor alamnya.

Perekonomian di Kabupaten Madiun tidak sepenuhnya berasal dari pertanian. Selain sektor pertanian, perekonomian masyarakat ditunjang oleh adanya sektor perkebunan, industri, dan jasa. Ketiga sektor ini juga berkembang dan memberikan pendapatan tersendiri bagi masyarakat meskipun perkembangannya tidak sebesar sektor pertanian. Masyarakat Kabupaten Madiun yang bekerja di sektor pertanian sebesar 95% dari jumlah keseluruhan penduduknya, itu artinya yang bekerja di sektor lainnya selain pertanian hanya sebesar 5%.⁷ Hal ini dikarenakan wilayah Madiun yang subur dan cocok sebagai tempat pengembangan pertanian.

C. Penerapan Program Pelita II dalam Bidang Pertanian di Kabupaten Madiun

Hasil pertanian di Kabupaten Madiun ini tidak terlepas kaitannya dari penggunaan bibit unggul. Penggunaan bibit unggul bertujuan untuk menekan jumlah produksi padi yang rentan terhadap serangan hama. Oleh karena itu untuk menyiasatinya, Pemerintah Kabupaten Madiun telah mewajibkan masyarakat untuk menanam bibit padi unggul atau yang dikenal dengan nama Varietas Unggul Lama (VUL) dengan jenis PB 5 dan PB 8, selain itu juga diberikan bibit

⁷ Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, *Sejarah Kabupaten Madiun*, (Madiun: Pemerintah Daerah, 1980), hlm. 351.

padi berjenis Pelita dan C4. Seluruh daerah di Kabupaten Madiun diwajibkan untuk menanam padi jenis-jenis unggul tersebut. Para petani berhasil menanam padi unggul hingga tiga kali panen setiap tahunnya berkat padi jenis ini. Pemerintah Daerah menyiapkan berbagai jenis bibit padi unggul tersebut yang dipusatkan di Kebon Bibit Dinas Pertanian di Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.⁸

Upaya pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun dihadapkan pada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan kondisi geografis, seperti rawan banjir dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Terjadinya serangan hama, musim kemarau yang kering dan panjang, adanya bencana banjir pada musim hujan merupakan kendala yang sifatnya sudah umum terjadi. Kendala yang paling mencolok terutama disebabkan oleh adanya serangan hama padi yang beraneka jenisnya. Serangan hama dan penyakit terutama eksploitasi hama wereng serta virus padi telah menghambat perkembangan produksi pertanian selama Pelita II. Pada tahun 1974 hingga 1978 terjadi serangan hama wereng secara besar-besaran di seluruh Indonesia.

Jaringan irigasi yang kecil saluran distribusinya juga menjadi kendala tersendiri di samping serangan hama yang semakin meningkat jumlahnya. Hal ini telah mengakibatkan laju perkembangan produksi terutama beras tidak setinggi yang diharapkan semula, bahkan jumlahnya lebih rendah dari laju perkembangan selama Pelita I. Pengairan yang dikembangkan selama Pelita I hingga Pelita IV

⁸ *Ibid.*, hlm. 409.

semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 1979, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Pengairan Madiun dibagi menjadi tiga seksi anggota, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian teknik. Seksi pengairan ini yaitu seksi pengairan Madiun, seksi pengairan Barat dan seksi pengairan Ponorogo.⁹

D. Pengaruh Pelita II Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Kabupaten Madiun Masa Pelita III

Tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Madiun secara umum meningkat sejak memasuki Pembangunan Lima Tahun Kedua. Pertanian di Kabupaten Madiun mencapai puncaknya pada tahun 1970an. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Kabupaten Madiun dalam memperoleh surplus beras tahun 1970an. Mulai dari Pelita II, pemerintah Kabupaten Madiun mulai mengadakan program kredit pertanian yang diberikan kepada para petani maupun pengusaha di lingkungan kabupaten. Pemberian kredit pertanian ini masih berlanjut pada masa Pelita III. Pemberian kredit pertanian akan disempurnakan sistem dan prosedur kreditnya. Hal ini dilakukan karena dalam usaha meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara penyederhanaan prosedur kredit Bimas Inmas dengan tujuan agar kredit tersebut dapat dijangkau oleh petani kecil dan buruh tani.

⁹ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 126 Tahun 1979*, berisi tentang Panitia Pelelangan Proyek-proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Pengairan Tahun 1979/1980.

Pembangunan Lima Tahun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru bukan hanya berpengaruh terhadap perkembangan pertanian selanjutnya, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian dan keadaan sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya akibat tergesernya peranan tenaga mereka dengan alat-alat pertanian yang jauh lebih modern, yang dinamakan dengan modernisasi alat-alat pertanian. Masuknya alat-alat pertanian ini telah membuat banyak petani kehilangan sumber pendapatan dan banyak dari mereka kemudian beralih ke pekerjaan lain.

Pergeseran ini kemudian memunculkan banyak tenaga kerja petani yang harus kehilangan pekerjaannya dan akhirnya menganggur. Pengangguran yang terus berkelanjutan dan semakin meningkat jumlahnya pada akhirnya akan menimbulkan adanya tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang umum terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Madiun adalah pencurian dan perampokan. Pencurian dan perampokan yang ada di Kabupaten Madiun ini kebanyakan terjadi pada bulan-bulan sesudah panen besar dilaksanakan, yaitu bulan April, Mei atau Juni.¹⁰ Di Kabupaten Madiun pada bulan-bulan tersebut memang waktunya selesai panen pertanian sehingga keadaannya sangat rawan dengan tindak kejahatan.

Modernisasi ini di sisi lain ternyata justru memberikan kemudahan bagi petani. Berkat masuknya alat-alat modern seperti traktor, huller, sabit, dan lain sebagainya, ternyata justru banyak digunakan masyarakat dalam memanen padi.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, *loc.cit.*

Hal ini dikarenakan keberadaannya yang dianggap praktis dan mempermudah pengerjaan sawah. Oleh karena itu, masuknya alat-alat modern pertanian menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

E. Kesimpulan

Kabupaten Madiun merupakan wilayah yang subur karena berada di dataran rendah dan keadaan ini didukung dengan adanya deretan pegunungan vulkanik. Pertanian di Kabupaten Madiun sudah mulai berkembang sejak zaman Kolonial. Perkembangan pertanian zaman Kolonial maupun zaman Jepang tidak jauh berbeda karena menindas rakyat. Pertanian mulai benar-benar berkembang setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, yang mencapai puncaknya pada masa Orde Baru tepatnya tahun 1984 yang ditandai dengan tercapainya swasembada beras. Swasembada beras ini merupakan salah satu keberhasilan pembangunan pertanian Orde Baru yang terangkum dalam agenda Pembangunan Lima Tahun.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Pelita ternyata memberikan banyak pengaruh terhadap masyarakat, baik dalam perkembangan pertaniannya maupun dalam bidang perekonomiannya. Di satu sisi perkembangan pertanian yang ditandai dengan revolusi hijau menguntungkan petani, karena berkat adanya alat-alat pertanian modern yang masuk ke masyarakat banyak membantu petani dalam proses pengerjaan sawahnya. Tetapi di sisi lain revolusi hijau ini justru menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan dengan masuknya alat-alat pertanian yang modern telah menggantikan peran dan

tenaga petani. Akibatnya, petani banyak yang kehilangan pekerjaannya dan terjadi pengangguran. Pengangguran ini kemudian menimbulkan adanya tindak kejahatan di Kabupaten Madiun, yaitu berupa pencurian dan perampokan.

Daftar Pustaka:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Kabupaten Madiun dalam Angka 1984*, Madiun: Kantor Pusat Statistik, 1984.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pembangunan Lima Tahun di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999.

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, *Potensi Desa Propinsi Jawa Timur: Type-Type Desa dan Tahap Perkembangannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1972.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 126 Tahun 1979*, berisi tentang Panitia Pelelangan Proyek-proyek di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Bidang Pengairan Tahun 1979/1980.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, *Sejarah Kabupaten Madiun*, Madiun: Pemerintah Daerah, 1980.

Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa: Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Suko Widodo, *Menelusuri Jejak Masa Lalu: Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun*,

Surabaya: PUSKAKOM & Pemerintah Kabupaten Madiun, 2005.

Zulkarnain, *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*,

Yogyakarta: Pujangga Press, 2012.

Pembimbing

Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Reviewer



Miftahuddin, M. Hum.

NIP. 19740302 2003121 006



Ririn Darini, M. Hum.

NIP. 19741118 199903 2 001